

PENGARUH KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Irda Nurhamsyah

irdanurhamsyah@rocketmail.com

Meinarni Asnawi

Paulus K. Allo Layuk

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of the capability of the government's internal supervisory apparatus to the level of its constituent elements based on the Internal Audit Capability Model (IACM) on the performance of regional financial management. The population of this study is 135 internal audit practitioners consisting of functional auditors and PPUPD officials at the Regency and City Inspectorate in West Papua Province. The research sample was 103 functional auditors and PPUPD officials at the Regency and City Inspectorates in West Papua Province. The study used primary data through the distribution of questionnaires. The analytical method used is multiple linear regression. The results showed that the APIP Human Resource Management variable partially had a positive and significant effect on the performance of regional financial management. The variables of APIP Roles and Services, APIP Professional Practices, APIP Accountability and Performance Management, Organizational Culture and Relations and Governance Structure partially have a positive but not significant effect on regional financial management performance. The six variables simultaneously have a positive and significant effect on the performance of regional financial management.

Keywords: *Capability; APIP; Performance; Regional Financial; Internal Audit*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah terhadap tingkat unsur penyusunnya berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian ini adalah 135 praktisi audit internal yang terdiri dari auditor fungsional dan pejabat PPUPD pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Barat. Sampel penelitian adalah 103 orang auditor fungsional dan pejabat PPUPD pada Inspektorat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Manajemen Sumber Daya Manusia APIP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Variabel Peran dan Pelayanan APIP, Praktik Profesi APIP, Akuntabilitas dan Kinerja Manajemen APIP, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Keenam variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: *Kemampuan; APIP; Pertunjukan; Keuangan Daerah; Audit internal*

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, diharapkan mampu mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Menteri / Kepala Lembaga setingkat Kementerian/ Kepala Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai perangkat pelaksana teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Inspektorat Daerah sebagai pelaksana teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di daerah, diharapkan mampu berperan efektif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah.

The Institute of Internal Auditor (IIA), yaitu sebuah asosiasi profesi auditor intern internasional, telah menerbitkan sebuah model pengukuran kapabilitas auditor intern yaitu *Internal Auditor Capability Model (IACM)* yang kemudian diadopsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi sebuah model rujukan dalam *Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019* yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015.

Penilaian kapabilitas APIP dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda dan atas hasil penilaian mandiri tersebut BPKP melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*). Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui level kapabilitas masing-masing APIP serta area kunci yang perlu dikembangkan untuk mencapai level kapabilitas lebih tinggi.

Dokumen Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP Kementerian/Lembaga/Pemda per 31 Desember 2014 diketahui sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada level 1, 69 APIP atau 14,56% berada pada level 2 dan 1 APIP atau 0,21% yang berada pada level 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar APIP belum mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dalam hal pencegahan korupsi, dan belum mampu memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, keekonomian dan akuntabilitas.

Isu utama yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif adalah keterbatasan jumlah personil yang memiliki kompetensi. Data Korsupgah KPK RI pada laman <https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019> menunjukkan bahwa rata-rata capaian kapabilitas APIP Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 baru mencapai 23% dengan capaian kecukupan jumlah personil APIP sebesar 26% dan capaian kompetensi APIP sebesar 24%.

Data pada BPKP Perwakilan Papua Barat menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2021 jumlah personil APIP Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 379 orang. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 114 orang atau 30% dari total personil yang merupakan pejabat fungsional auditor dan sebanyak 21 orang atau 5,54% dari total personil yang merupakan pejabat fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan kondisi ini, sangat sulit bagi Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif. Data Korsupgah KPK RI pada laman <https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019> menunjukkan bahwa rata-rata capaian Korsupgah korupsi pada kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 baru mencapai 34% dengan sub area terlemah pada Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sistem Pengawasan Keuangan Desa.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI menunjukkan bahwa dari 26.483 rekomendasi yang disampaikan BPK RI kepada Pemerintah Daerah, baru 29,8%

atau 7.891 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sebanyak 30,6% atau 8.087 rekomendasi dalam proses penyelesaian tetapi belum sesuai rekomendasi dan sisanya sebanyak 39,7% atau 10.505 rekomendasi belum ditindaklanjuti. (BPK RI, 2020) Dalam konteks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah berperan sebagai fasilitator yang bertugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada perangkat daerah dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjutnya. Tingginya jumlah rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan kurangnya personil teknis pengawasan, keterbatasan anggaran atau komitmen pimpinan yang tidak mendukung peran Inspektorat Daerah.

Penulis tertarik untuk meneliti apakah pola hubungan antara kapabilitas APIP dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah juga berlaku pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian dilakukan sampai ke tingkat elemen pembentuk kapabilitas APIP berdasarkan *IACM* yang terdiri dari :

- a. Peran dan Layanan APIP
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP
- c. Praktik Profesional APIP
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi
- f. Struktur Tata Kelola

Dengan demikian hasil penelitian dapat menggambarkan tingkat pengaruh masing-masing elemen pembentuk kapabilitas APIP secara parsial dan secara simultan (bersama-sama) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *New Public Management*

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentralistik dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management*. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. (Kelman, 2006)

Perubahan paradigma dari *Old Public Management* yang berorientasi prosedur administratif menjadi *New Public Management* yang berorientasi kinerja dan pelayanan, mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Internal Audit Capability Model (IA-CM)

Internal Audit Capability Model adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA) untuk memperkuat pengawasan intern melalui langkah evolusi. Langkah-langkahnya disusun menjadi 5 tahapan kemampuan progresif. Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap menjadi dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang. (BPKP, 2015)

Pengaruh Peran dan Layanan APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Fikriania Nurkhaifah Iswanto, Yanti Rufaedah menyimpulkan bahwa Peran APIP berpengaruh signifikan terhadap Opini LKPD. (Iswanto & Rufaedah, 2019) Adapun Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey menyimpulkan bahwa fungsi audit intern berpengaruh

terhadap kinerja. (Jitmau et al., 2017) Hal ini bersesuaian dengan Hermanson dan Rittenberg (2003) yang berpendapat bahwa keberadaan fungsi audit intern yang efektif berhubungan dengan kinerja utama organisasi. (Kiabel, 2012)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H1 : Diduga bahwa Peran dan Layanan APIP berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Pengelolaan SDM APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh APIP berkaitan erat dengan ketersediaan jumlah dan kompetensi personil yang dimiliki. Keterbatasan jumlah personil akan menyebabkan APIP tidak mampu menjangkau seluruh unit kerja yang diawasi. Adapun tingkat kompetensi yang dikuasai oleh personil akan mempengaruhi kualitas layanan APIP. Semakin tinggi kompetensi yang dikuasai personil maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh APIP dalam rangka pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Arsyati, et al (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Universitas Syah Kuala (Arsyati, Darwanis, 2008)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H2 : Diduga bahwa Pengelolaan SDM APIP berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Praktik Profesional APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Praktik profesional akan menjamin seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan APIP sesuai dengan standar profesi. Kualitas proses dan hasil kegiatan APIP dapat terjaga dan akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, praktik profesional yang diterapkan oleh APIP akan mampu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerjanya.

Chairul Anwar dan Tiya Agustina dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. (Anwar & Agustina, 2014)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H3 : Diduga bahwa Praktik Profesional APIP berpengaruh terhadap Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Cloyd (1997) membuktikan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Sedangkan Dani (2006) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah, baik aspek akuntabilitas dan interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. (Kuraesin & Umar, 2015)

Meningkatnya kualitas hasil kerja auditor akan meningkatkan kualitas layanan APIP dalam rangka pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian akuntabilitas yang diterapkan oleh APIP akan mampu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H4 : Diduga bahwa Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP berpengaruh terhadap
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Budaya dan Hubungan Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Ravasi dan Schultz (2006) menulis bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi bersama yang memandu apa yang terjadi dalam organisasi dengan mendefinisikan perilaku yang sesuai untuk berbagai situasi. (David & Tarigan, 2016)

Ozzie dan Malelak (2015) melakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa penerapan budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian lain, Johari (2002) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari *corporate culture* terhadap kinerja keuangan. (David & Tarigan, 2016)

IACM menyebutkan bahwa efektivitas audit intern dipengaruhi bagaimana budaya dan hubungan internal lembaga audit intern dan lingkungannya serta bagaimana budaya dan hubungan itu memberi dampak kepada pemangku kepentingan kunci dan pihak-pihak lain di luar organisasi. (Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2009)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H5 : Diduga bahwa Budaya dan Hubungan Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Struktur Tata Kelola terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur tata kelola yang mendukung aktivitas audit intern meliputi hubungan pelaporan kepada pimpinan organisasi, kesesuaian aktivitas audit intern dengan struktur tata kelola organisasi, terjaminnya independensi dan objektivitas audit melalui mandat, kewenangan resmi dan adanya pengawasan oleh pimpinan organisasi serta kebijakan organisasi yang mendukung aktivitas audit intern selanjutnya memberi sumbangsih terhadap efektivitas audit intern. (Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2009). Selanjutnya Hermanson dan Rittenberg (2003) yang berpendapat bahwa keberadaan fungsi audit intern yang efektif berhubungan dengan kinerja utama organisasi. (Kiabel, 2012)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H6 : Diduga bahwa Struktur Tata Kelola berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh 6 Elemen Kapabilitas APIP secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indriyani Wulandari Bandi menyimpulkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pemberian opini audit BPK RI atas laporan keuangan

(Wulandari & Bandi, 2015) sedangkan Rifqi Subhanulah Utama dan Ivan Yudianto menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif sebesar 28,8% terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang. (Utama & Yudianto, 2019). Hal ini didukung Husen Achmad Syawie, Grace B. Nangoi, Lintje Kalangi yang menyimpulkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. (Syawie et al., 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikemukakan adalah :

H7 : Diduga bahwa seluruh elemen kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu melalui pengamatan dan wawancara serta studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari hasil penelitian yang terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang gejala-gejala yang muncul dalam proses pengumpulan data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 135 orang praktisi audit intern yang terdiri dari 114 orang pejabat fungsional auditor dan 21 orang pejabat fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan salah satu jenis teknik *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan (Sugiyono, 2013)

Roscoe berpendapat bila dalam penelitian akan melakukan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi ganda) maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini menggunakan 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat. sehingga jika merujuk pada pendapat Roscoe maka dibutuhkan sampel penelitian minimal sebanyak $7 \times 10 = 70$ sampel.

Selain itu, untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dapat digunakan rumus Slovin (1960) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

di mana :

N = Populasi

n = jumlah sampel

e = margin kesalahan (error)(Rahmah, 2016)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 135 orang dengan margin kesalahan sebesar 5%. Jika menggunakan rumus Slovin di atas maka dibutuhkan jumlah sampel yang representatif sebanyak :

$$n = \frac{135}{1 + (135 \times 0,05^2)} = 100,9345 \approx 101 \text{ sampel.}$$

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 103 responden sehingga berdasarkan pendapat Roscoe dan Slovin jumlah sampel penelitian ini dapat dikatakan representatif.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan teknik analisis korelasi parsial sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat digunakan analisis korelasi ganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan adalah valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel (handal).

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda diperlukan untuk mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikansinya sehingga bisa digunakan untuk menjawab hipotesis. Hasil analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.141	.278		-.508	.613		
	rX1	.022	.143	.025	.152	.879	.125	8.032
	rX2	.335	.101	.417	3.317	.001	.216	4.638
	rX3	.065	.143	.071	.453	.652	.137	7.291
	rX4	.119	.166	.126	.720	.473	.111	8.970
	rX5	.129	.159	.127	.813	.418	.139	7.187
	rX6	.108	.153	.104	.704	.483	.158	6.340

a. Dependent Variable: rY

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = (-0,141) + 0,022X_1 + 0,335X_2 + 0,065X_3 + 0,119X_4 + 0,129X_5 + 0,108X_6 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa elemen Peran dan Layanan APIP (X1), Pengelolaan SDM APIP (X2), Praktik Profesional (X3), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP (X4), Budaya dan Hubungan Organisasi (X5) dan Struktur Tata Kelola (X6) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Hasil perhitungan koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.673	.652	.41856

a. Predictors: (Constant), rX6, rX2, rX3, rX5, rX1, rX4

b. Dependent Variable: rY

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai adjusted R-Square sebesar 0,652. Hal ini menunjukkan bahwa 65,2% dari variasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 sedangkan sisanya sebesar 34,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji Parsial (Uji t)

Untuk menentukan nilai t tabel dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Diketahui :

n = 103 responden

k = 7 variabel

α = 5% = 0.05

pengujian dua arah, maka diperoleh ttabel = 1.985

a. Pengaruh Peran dan Layanan APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan peran dan layanan APIP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan peran dan layanan APIP adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh APIP dalam memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Tetapi seberapa besar peran dan layanan APIP dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas layanan, seberapa luas bagian organisasi yang dapat dilayani dan bagaimana organisasi menindaklanjuti umpan balik yang dihasilkan oleh layanan APIP. Kualitas peran dan layanan APIP dipengaruhi tingkat kompetensi auditor, luas cakupan layanan dipengaruhi ketersediaan anggaran dan jumlah personil sedangkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut dipengaruhi budaya dan hubungan organisasi. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa walaupun peran dan layanan APIP dapat secara positif mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah, tetapi untuk memberikan pengaruh signifikan membutuhkan faktor penguangkit yaitu pada elemen pengelolaan sumber daya manusia dan budaya dan hubungan organisasi.

b. Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Koordinator Pengawasan P3A BPKP Perwakilan Papua Barat dalam sesi wawancara menyatakan bahwa : “ *Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat belum memadai, khususnya dari segi kompetensi.*”

Plt. Inspektur Kabupaten Manokwari dalam sesi wawancara menyatakan bahwa : “*Kecukupan jumlah dan kompetensi personil itu relatif. Secara standar memang masih belum mencukupi, namun Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari berusaha mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan sebaik-baiknya.*” Hal ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan jumlah personil yang dimiliki, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota telah berupaya memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

c. Pengaruh Praktik Profesional APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Praktik Profesional APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan masih terdapat Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota yang belum melaksanakan telaah sejawat (*peer review*).

Telaah sejawat (*peer review*) adalah kegiatan saling uji antar auditor baik di dalam kantor sendiri maupun dengan auditor dari luar organisasi yang bertujuan untuk memperoleh pandangan pihak lain tentang kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap standar audit. Hal ini membantu auditor menemukan kelemahan dalam praktik pengawasan yang dilakukannya, yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh auditor yang melaksanakan penugasan. Peningkatan Praktik Profesional APIP dapat dilakukan dengan mengikutsertakan auditor dalam sertifikasi profesi pengawasan, di samping kegiatan

asosiasi auditor intern AAPI yang telah ada. Data BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2021 baru terdapat 18 orang auditor yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan yaitu 1 orang CLA (*Certified Law Auditor*), dan 17 CFrA (*Certified Forensic Auditor*) pada 5 APIP di Provinsi Papua Barat.

d. Pengaruh Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja bermanfaat untuk menyediakan informasi kinerja yang akurat. Informasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi yang menghasilkan feed back berupa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Elemen lain yang dapat dipengaruhi oleh elemen ini adalah Peran dan Layanan, Praktik Profesional dan sebagian elemen Pengelolaan SDM. Dengan demikian, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja pada Inspektorat Daerah merupakan faktor pengungkit bagi 3 elemen tersebut dan tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

e. Pengaruh Budaya dan Hubungan Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Budaya dan Hubungan Organisasi APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Data hasil *Quality Assurance* (penjaminan mutu) pada BPKP Perwakilan Papua Barat pada bulan Desember 2018 menunjukkan bahwa terdapat 11 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat yang level elemen Budaya dan Hubungannya telah mencapai level 3. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Kepala Daerah telah mendukung Inspektorat Daerah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola. Demikian pula organisasi eksternal yaitu BPKP, BPK RI, KPK RI dan Inspektorat

Jenderal Kementerian Teknis telah banyak memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan asistensi. Sayangnya, hal ini tidak didukung ketersediaan tenaga berkompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa budaya dan hubungan organisasi menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

f. Pengaruh Struktur Tata Kelola APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Struktur Tata Kelola APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Data hasil *Quality Assurance* (penjaminan mutu) pada BPKP Perwakilan Papua Barat pada bulan Desember 2018 menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, hanya 2 kabupaten yang level elemen Struktur Tata Kelolanya telah mencapai level 3 yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.

Independensi dan objektivitas Inspektorat sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh simpulan hasil pengawasan benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan terbebas dari pengaruh pihak yang diawasi. Dengan demikian, elemen Struktur Tata Kelola merupakan faktor pengungkit bagi kualitas audit yang merupakan bagian dari elemen Peran dan Layanan. Oleh sebab itu maka Struktur Tata Kelola tidak dapat secara parsial mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa secara parsial, elemen Struktur Tata Kelola berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F menggunakan aplikasi SPSS terhadap data penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.541	6	5.757	32.860	.000 ^b
	Residual	16.818	96	.175		
	Total	51.359	102			
a. Dependent Variable: rY						
b. Predictors: (Constant), rX6, rX2, rX3, rX5, rX1, rX4						

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka Fhitung antara variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara simultan sebesar 32,86

Nilai Ftabel ditentukan sebagai berikut :

Diketahui :

n = 103 responden

k = 7 variabel

tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% = 0.05

Maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,19.

Karena nilai Fhitung (32,86) lebih besar dibandingkan nilai Ftabel (2,19) dan nilai probabilitas sebesar 0.000, lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel peran dan layanan APIP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.

2. Variabel pengelolaan sumber daya manusia APIP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
3. Variabel praktik profesional APIP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
4. Variabel akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
5. budaya dan hubungan organisasi mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
6. Variabel struktur tata kelola mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
7. Variabel peran dan layanan APIP, pengelolaan sumber daya manusia APIP, praktik profesional APIP, akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan elemen kapabilitas APIP yang dominan dibandingkan elemen-elemen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Purwanda, E. (2019). Analisis Kapabilitas Karyawan Bagian PPIC Di PT . Idola Selaras Abadi. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 6681, 855–863.
- Anwar, C., & Agustina, T. (2014). *Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor*. 5(2).

- Arsyati, Darwanis, M. A. D. (2008). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KUALA Arsyati Alumni Program Magister Sains Akuntansi PPs Unsyiah Darwanis Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Muslim A . Djalil Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(1), 29–49.
- Assyifa, N. (2014). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Direktorat Jendral Minyak Dan Gas Bumi). *Jurnal SDM*, 1–13.
- Azzindani, R., & Pituringsih, E. (2019). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Implementasi SIMDA , Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), NTB , Indonesia PENDAHULUAN Pemerinta*. 27, 418–445.
- Bimantara, T. M., & Laksito, H. (2015). PENGARUH EFEKTIFITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN BUMN DIMODERASI OLEH PENGARUH POLITIK (Studi Empiris di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(2), 123–139. <https://doi.org/10.14710/jaa.v12i2.13862>
- BPK RI. (2020). IHPS II Tahun 2020. In *Bpk* (1st ed., Vol. 28, Issue 165). BPK RI.
- David, V., & Tarigan, J. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan melalui Perilaku Manajer atas Isu Manajemen Lingkungan sebagai Variabel Interveningnya. *Business Accounting Review*, 4(1), 61–71.
- Hi.Ibrahim, Abd Halil; Supriatna, T. (2019). Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. In *Gramasurya*.
- Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 58–76. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Institute of Internal Auditors Research Foundation. (2009). *Internal audit capability model for the public sector* (Issue May 2009). <https://na.theiia.org/iiaarf/Public Documents/Internal Audit Capability Model IA-CM for the Public Sector Overview.pdf>
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan SPIP untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1146–1159.
- Jehandu, V., Salle, A., & Layuk, P. K. A. (2019). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Papua. In *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 4, Issue 3).
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan

- Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Kelman, S. (2006). The Oxford Handbook of Public Management. *Academy of Management Review*, 31(4), 1094–1098. <https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22528646>
- Kiabel, B. D. (2012). *Internal Auditing and Performance of Government Enterprises: A Nigerian Study*. 12(6).
- Kuraesin, A. D., & Umar, H. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal. *Visipena Journal*, 7(2), 157–170. <https://doi.org/10.46244/visipena.v7i2.326>
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 150–159. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780>
- Moeller, R. (2016). *Brink ' s Modern Internal Auditing Eighth Edition* (8th ed.). John Wiley & Sons. Inc.
- Nanincova, N. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro. *Agora*, 7(2), 1–5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Issue 42). (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (p. 121). (2008).
- Rahmah, N. A. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KOTA PALU. *E Jurnal Katalogis*, 4(9), 17–28.
- Stawati, V. (2020). Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PROFITABILITAS , LEVERAGE DAN UKURAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sumarsih, & Wulandari, R. (2012). Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 208–225.
- Suparmi. (2019). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Keuangan Daerah Universitas Papua*.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenadamedia Grup.

Syawie, H. A., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2017). Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 140–149. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17746>

Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis,* 15(2), 148. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Desain Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

BPKP (2020). Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Papua Barat Tahun 2019